

ABSTRACT

This study will reveal the pluralization of foreign policymaking by examining the roles of Islamic political parties and Islamic organizations as interest groups between 1966 and 2021. This dissertation argues that pluralization in foreign policy is strongly connected with whether foreign policy issues are considered ideological for domestic actors, regardless of the regime type. Studies about Indonesian foreign policy often argue that the transition from an authoritarian regime to a democratic regime has increased the participation of Islamic groups in foreign policy making. However, despite the fact that democratization made space for domestic players, contemporary research has ignored their engagement in international politics and the effect these actors have on foreign policy making. Thus, the aim of this study is to find an answer to the question of how these domestic actors are participating in and influencing foreign policymaking. To examine this problem, this study chooses PAN, PKB, and PKS as Islamic political parties and Muhammadiyah and Nahdlat'ul Ulama as Islamic interest groups to reveal the influence of domestic actors on foreign policy. To examine the participation of domestic actors' in the foreign policy-making process, this study will use Rabin's visit and the Bosnian War in the New Order period, then the Iranian Nuclear Issue (2008) and Mustafa Kemal Atatürk's name issue (2021) in the Reformation period. These cases are relevant; I considered them ideological, and all the actors mentioned are involved in the foreign policy-making process. This thesis will use Hudson and Skidmore's statist-pluralist model as a theoretical framework to examine whether leaders or governments need or do not need the support of domestic actors. This dissertation is qualitative research and uses constructivist methodology to understand social reality and the intersubjective process between domestic actors. This methodology is relevant since, in the formation process of Indonesia's new foreign policy identity, making sense of the values and world views of the other domestic actors, apart from the executive, has contributed to the process of building the foreign policy identity.

Keywords: Pluralization, Foreign Policy, Political Parties, Interest Groups

ABSTRAK

Kajian ini akan mengungkap pluralisasi pembuatan kebijakan luar negeri dengan mengkaji peran partai politik Islam dan organisasi Islam sebagai kelompok kepentingan antara tahun 1966 dan 2021. Disertasi ini berpendapat bahwa pluralisasi dalam kebijakan luar negeri sangat terkait dengan apakah isu kebijakan luar negeri dianggap ideologis bagi aktor domestik, terlepas dari jenis rezim. Kajian tentang kebijakan luar negeri Indonesia seringkali berargumen bahwa peralihan dari rezim otoriter ke rezim demokrasi telah meningkatkan partisipasi kelompok Islam dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa demokratisasi memberi ruang bagi para pemain domestik, penelitian kontemporer telah mengabaikan keterlibatan mereka dalam politik internasional dan pengaruh aktor-aktor tersebut terhadap pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana aktor-aktor domestik tersebut berpartisipasi dan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Untuk mengkaji masalah tersebut, studi ini memilih PAN, PKB, dan PKS sebagai partai politik Islam serta Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai kelompok kepentingan Islam untuk mengungkap pengaruh aktor dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri. Untuk mengkaji partisipasi aktor dalam negeri dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, kajian ini akan menggunakan kunjungan Rabin dan Perang Bosnia pada masa Orde Baru, kemudian Isu Nuklir Iran (2008) dan isu nama Mustafa Kemal Atatürk (2021) dalam periode Reformasi. Kasus-kasus ini relevan; Saya menganggap mereka ideologis, dan semua aktor yang disebutkan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Tesis ini akan menggunakan model statist-pluralis Hudson dan Skidmore sebagai kerangka teoritis untuk mengkaji apakah pemimpin atau pemerintah membutuhkan atau tidak membutuhkan dukungan aktor domestik. Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metodologi konstruktivis untuk memahami realitas sosial dan proses intersubjektif antar aktor domestik. Metodologi ini relevan karena, dalam proses pembentukan identitas politik luar negeri Indonesia yang baru, memahami nilai-nilai dan pandangan dunia aktor domestik lainnya, selain eksekutif, telah berkontribusi dalam proses membangun identitas politik luar negeri.

Kata Kunci: Pluralisasi, Kebijakan Luar Negeri, Partai Politik, Kelompok Kepentingan